

**EFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF LURAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN HUTABALANG KECAMATAN
BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

Oleh :

JULITA DEWI

NPM 1503100034

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : JULITA DEWI
NPM : 1503100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF LURAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN HUTABALANG KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Medan, 14 Maret 2019

PEMBIMBING



SYAERUDDIN, S.Sos, MH

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd



DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : JULITA DEWI
NPM : 1503100034
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

(.....)

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

(.....)

PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

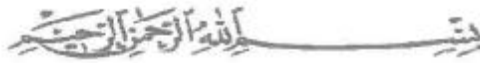


Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

SURAT PERNYATAAN



Dengan ini saya, JULITA DEWI, NPM 1503100034 menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsinya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 04 Maret 2019

Yang Menyatakan



Julita Dewi
JULITA DEWI



Agak Cerdas & Terpercaya
Setiap surat ini agar diebutkan
pada tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : JULITA DEWI
NPM : 1503100034
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Gaya Kepemimpinan Partisipatif Lurah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Hutabatang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	23. 1. 19	- Perbaiki yg diberi tanda pada Bab. I - (supas kata-kata yg sama)	
2.	26. 1. 19	- Perbaiki yg diberi tanda pada Bab II - Uraian UU tentang tly Kelurahan	
3.	3. 2. 19	- Definisi Konsep Paralel ditambah - Rio Sabar mana sudah harus jelas	
4.	15. 2. 19	- Mtc Bab. I, II dan III	
5.	20. 2. 19	- Perbaiki kata sama pada Bab. IV	
6.	26. 2. 19	- Perbaiki kembali penulisan (4, 3, 3, 4) - Perbaiki mri simpulan dan saran pada Bab. V.	
7.	2. 3. 19	- Lengkapi abstrak, surat pernyataan daftar isi, daftar tabel dan melengkapinya lainnya	
8.	5. 3. 19	Mtc Pemb skripsi dapat diujikan dan sudah layak ujian	

Medan, ... 05... 03... 2019..

Dekan,

Dr. Arifin Sareh, S.Sos., M.Pd

Ketua Program Studi,

Naini Khairiah, S.P., M.Pd

Pembimbing ke : ..I..

Syafarudin, S.Sos., M.H

ABSTRAK

EFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF LURAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN HUTABALANG KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

JULITA DEWI

NPM 1503100034

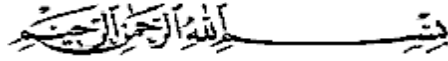
Lurah merupakan kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan desa. Jadi, maju atau mundurnya suatu desa bergantung bagaimana gaya kepemimpinan Lurahnya dalam menjalankan pemerintahannya. Dilihat dari kepemimpinan Lurah Hutabalang dikenal dengan mempunyai gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang salah satunya proses pembangunan Kelurahan dan di dalam pengambilan keputusan atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Gaya kepemimpinan Lurah di Kelurahan Hutabalang yang partisipatif yaitu pemimpin dan bawahan saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dengan maksud lain untuk mampu mengkoordinasikan segala kegiatan daripada orang-orang atau bawahan untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mewujudkan suatu hasil yang sesuai dengan yang telah direncanakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas gaya kepemimpinan partisipatif lurah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas gaya kepemimpinan partisipatif lurah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dan informan penelitian yang terdiri atas 6 orang, maka dalam penelitian akan mewawancarai 6 orang informan penelitian yang terdiri atas 4 orang aparatur Kelurahan Hutabalang dan 2 orang tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan yang digunakan Lurah telah berjalan dengan baik namun belum efektif. Untuk mengusulkan pendapat masih kurang, karena di dalam musyawarah Lurah masih dihiasi dengan gaya kepemimpinan demokratis. Di Kelurahan Hutabalang masih ada kendala dalam pelaksanaan pembangunan yaitu belum ada dana yang khusus untuk pembangunan Kelurahan.

Kata Kunci : Efektivitas, Gaya Kepemimpinan Partisipatif, Pembangunan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Serangkaian kata terimakasih juga saya berikan khusus kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan yang saya sayangi yaitu Ayahanda Fahrudin Batubara dan Ibunda Anna Delima S.Pd.I. yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Juga untuk kakak saya Irna Mawarni S.Pd.dan kakak saya Ade Irma yang begitu berharga. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah diberikan oleh semuanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata I sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lembaran ini sekaligus menjadi media bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada

semua pihak yang telah cukup banyak memberikan semangat. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dari berbagai pihak dan Kasih sayang yang di berikan oleh Allah SWT sehingga semua kendala yang dihadapi dapat diatasi. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zufahmi, M. I Kom, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Abrar Adhani S. Sos., M. I Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Bapak Ananda Mahardika S. Sos., M.AP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Syafruddin, S.Sos., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan saya ilmu semenjak awal perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu dan Bapak pegawai Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah dan staf-staf yang telah membantu saya dalam melaksanakan penelitian di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Kepada teman terdekat saya Ahmad Gusandi Saputra. A.M.K yang selalu memberikan support, bantuan serta motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya : Nur Waridah Nasution, Siti Hanifah Nasution, Destya Rawi Hasibuan, Nur Azizah Piliang, Enni Muniroh Rangkuti, Meri Afridah Nasution saling berbagi serta selalu memberikan support, bantuan serta motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan IAN FISIP 2015, Ely Wahyuni, Rini Anggi Safitri, Dety Pratiwi dan seluruh rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga sukses kawan-kawan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari sepenuhnya sebagai penulis pemula tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Untuk itu penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

JULITA DEWI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Konsep Eefektivitas	8
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	8
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kepemimpinan....	9
2.2 Kepemimpinan.....	10
2.2.1 Pengertian Kepemimpinan	10
2.2.2 Teori Kepemimpinan.....	11
2.2.3 Ciri-Ciri Pemimpin.....	12
2.3 Konsep Gaya Kepemimpinan Partisipatif.....	13

2.3.1	Pengertian Kepemimpinan Partisipatif.....	13
2.3.2	Ciri-Ciri Kepemimpinan Partisipatif.....	16
2.3.3	Prosedur Pengambilan Keputusan.....	16
2.4	Konsep Lurah.....	18
2.4.1	Pengertian Lurah	18
2.4.2	Tugas Kelurahan.....	18
2.4.3	Fungsi Lurah.....	19
2.4.4	Alokasi Anggaran Kelurahan	20
2.5	Konsep Pembangunan.....	22
2.5.1	Pengertian Pembangunan	22
2.5.2	Ide Pokok Pembangunan	23
2.5.3	Tujuan Pembangunan	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	25
3.2	Kerangka Konsep.....	26
3.3	Defenisi Konsep.....	27
3.4	Kategorisasi	28
3.5	Narasumber.....	28
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7	Teknik Analisis Data	31
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.9	Deskripsi Ringkas Objek Kajian.....	32
3.9.1	Sejarah Singkat Kelurahan Hutabalang.....	32

3.9.2 Kondisi Geografis.....	33
3.9.3 Kondisi Demografi	34
3.9.4 Sarana Dan Prasarana Kelurahan Hutabalang.....	35
3.9.5 Struktur Organisasi Kelurahan Hutabalang.....	36
3.9.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Hutabalang	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	45
4.1.1 Deskripsi Narasumber	45
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	48
4.2 Pembahasan.....	61

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Penduduk Kelurahan Hutabalang Tahun 2018.....	34
Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana Kelurahan Hutabalang	35
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	46
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdsarkan Jabatan Pekerjaan	47
Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	26
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kelurahan Hutabalang	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	: Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sederetan pembaharuan tersebut membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah di kelurahan menjadi tanggung jawab Lurah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 ditegaskan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrembangdes, hasil musyawarah tersebut di tetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBD. Dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dibantu oleh perangkat kelurahan dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Pada sebuah organisasi pemerintah kelurahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia.

Jika dilihat tugas dari seorang pemimpin yang lebih tertuju yaitu pada pembangunan yang direncanakan, seperti pembangunan di suatu daerah/desa. Pembangunan kelurahan bisa diartikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Lurah, dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan di kelurahan tersebut, guna mencapai percepatan modernisasi kehidupan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga tercapai tujuan pembangunan yang efektif di daerah.

Penerapan gaya kepemimpinan partisipatif lurah tertentu tidak semata dapat dengan mudah dan cepat untuk diterima dan dipatuhi oleh anggota organisasi, mengingat tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas masing-masing individu di dalam organisasi cenderung beranekaragam. Maka dari itu, pengadopsian gaya kepemimpinan oleh seorang pemimpin perlu sejumlah pertimbangan dan pentahapan yang tidak sederhana. Kadangkala, lingkungan kerja yang telah tercipta sedemikian rupa dan telah dihiasi oleh gaya kepemimpinan yang mampu diterima dengan baik oleh anggota organisasi namun kemudian harus mengalami perubahan seiring dengan pergantian kepemimpinan, justru dapat pula membawa perubahan terhadap pelaksanaan aktivitas organisasi.

Sebagaimana konsepsi perubahan organisasi, perubahan yang terjadi tidak selalu bersifat negatif atau membawa kemunduran, tetapi dapat pula bernilai positif atau membawa kemajuan yang lebih berarti.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, Lurah Hutabalang tidak hanya sekedar memberi arahan kepada warga dan bawahannya untuk melaksanakan kegiatan, beliau juga selalu mendengarkan atau memberi kesempatan kepada warga dan bawahannya untuk memberi saran, pendapat atau bahkan kritik dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya. Lurah Hutabalang selalu mendengarkan aspirasi mereka melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dari berbagai permasalahan yang ada yaitu gaya kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh Lurah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah belum efektif, sebab gaya kepemimpinan partisipatif yang diterapkan Lurah Hutabalang masih dihiasi dengan gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan Lurah mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta senang mengembangkan kapasitas dari pribadinya sebagai pemimpin dan selalu menerima saran, pendapat serta kritik dari bawahannya atau aparat desa.

Lurah merupakan kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan desa. Jadi, maju atau mundurnya suatu desa bergantung bagaimana gaya kepemimpinan Lurah dalam menjalankan pemerintahannya. Dilihat dari kepemimpinan Lurah

Hutabalang dikenal mempunyai gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang salah satunya proses pembangunan Kelurahan dan di dalam pengambilan keputusan atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Gaya kepemimpinan Lurah di Kelurahan Hutabalang yang partisipatif yaitu pemimpin dan bawahan saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dengan maksud lain untuk mampu mengkoordinasikan segala kegiatan daripada orang-orang atau bawahan untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mewujudkan suatu hasil yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Oleh karena itu dengan melaksanakan gaya kepemimpinan partisipatif lurah ini, maka pemimpin dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan kelurahan karena dengan gaya kepemimpinan ini semua unsur (perangkat kelurahan) yang ada dalam organisasi akan bekerja dengan porsi/beban yang lebih besar sehingga mampu menghasilkan sebuah output atau hasil kerja yang maksimal dalam mencapai sebuah efektivitas.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kelurahan, maka Kelurahan Hutabalang yang berada dibawah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, dimana dipimpin seorang Lurah yang merupakan Kepala pemerintahan di kelurahan, serta memiliki perangkat-perangkat kelurahan, diantaranya termasuk kepala-kepala lingkungan dan perangkat lainnya. Kelurahan sebagai level pemerintahan yang berada di bawah camat, tentunya menginginkan jalannya organisasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam semangat otonomi daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kekurangan yang sangat signifikan dari para Pegawai Kelurahan yang tercermin dari sikap dan perilaku.

Adapun pembangunan yang ada di desa yang telah dilakukan oleh Lurah Hutabalang Kecamatan Badiri dalam 1 Tahun terakhir dimasa Pemeritahan ataupun dimasa Periode selama menjadi Lurah yaitu, sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan jalan out-mid jalan lingkar di Kelurahan Hutabalang.
2. 2 Unit pembangunan prasarana pasar di Kelurahan Hutabalang.
3. Pembangunan saluran irigasi di Kelurahan Hutabalang.
4. Pengerasan jalan Lingkungan VII di Kelurahan Hutabalang.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengambil judul sebagai berikut **“Efektivitas Gaya Kepemimpinan Partisipatif Lurah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas gaya kepemimpinan partisipatif lurah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas gaya kepemimpinan partisipatif lurah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan dan pengetahuan dalam studi Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan Kepemimpinan Lurah.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi Lurah di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri kabupaten Tapanuli Tengah mengenai efektivitas gaya kepemimpinan partisipatif Lurah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mengambil kebijakan yang mengarahkan kepada kemajuan institusi.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan proposal ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Paada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang relevan tentang Efektivitas Gaya Kepemimpinan Partisipatif Lurah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, informan/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang Analisis Data, Penyajian Dat, Pengolahan Data.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang yang menguraikan tentang Kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Rosalina (2012 : 3), efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai, agar tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan ataukah justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Gunawan (2003 : 2) menyatakan bahwa : "Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya Nainggolan (2006 : 8) menjelaskan bahwa, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai.

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kepemimpinan

Sopiah (2008 : 116) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan mencakup kepribadian, pengalaman masa lampau dan harapan dari pimpinan tersebut, harapan dan perilaku atasan, karakteristik, harapan dan perilaku bawahan, persyaratan tugas, kultur, kebijaksanaan organisasi dan harapan serta perilaku rekan. Pada gilirannya faktor-faktor ini juga mempengaruhi pemimpin. Proses pengaruh tersebut bersifat timbal balik antara pemimpin dan anggota kelompok, saling mempengaruhi hingga mempengaruhi efektivitas kelompok secara keseluruhan. Nilai, latar belakang dan pengalaman pemimpin mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinan seseorang. Sering pemimpin yang telah berhasil melaksanakan supervisi kecil, misalnya atau yang menghargai kebutuhan pemenuhan diri bawahan mungkin memilih gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai/karyawan.

Seorang pemimpin yang tidak mempercayai bawahan atau benar-benar ingin mengelola semua aktivitas kerja secara langsung mungkin memilih gaya kepemimpinan yang otoriter. Pada umumnya pemimpin mengembangkan gaya kepemimpinan yang paling menyenangkan bagi dirinya. Kenyataan bahwa kepribadian atau pengalaman masa lampau seorang pemimpin membantu membentuk gaya kepemimpinannya tidaklah berarti bahwa gaya tersebut tidak dapat diubah. Pemimpin belajar bahwa gaya tertentu memberikan hasil yang lebih baik bagi mereka daripada gaya lainnya. Jikalau suatu gaya ternyata tidak cocok, mereka dapat mengubahnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa pemimpin yang

mencoba memilih gaya yang sangat tidak sesuai dengan kepribadian dasarnya maka mustahil untuk menggunakan gaya tersebut secara efektif.

Sopiah (2008 : 118) menyatakan bahwa Harapan seorang pemimpin juga merupakan faktor yang berpengaruh. Telah diperlihatkan karena berbagai alasan, situasi cenderung berkembang ke arah yang kita inginkan. Harapan pemimpin mengenai gaya yang diperlukan agar bawahannya bekerja secara efektif mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinannya.

2.2 Konsep Kepemimpinan

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan

Menurut Kast dan Rosenzweig (2002 : 515) bahwa kepemimpinan adalah bagian dari manajemen, tetapi tidak semuanya, misalnya para manajer perlu membuat rencana dan mengorganisasi, tetapi yang diminta pemimpin hanyalah agar mereka memengaruhi orang lain untuk ikut. Menurut Dubrin (1993 : 263) bahwa kepemimpinan adalah suatu usaha memengaruhi orang antar-perseorangan (interpesona), lewat proses komunikasi untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Sedangkan menurut Stoner (1996 : 161) Pemimpin adalah suatu proses pengarahan dan memengaruhi aktivitas berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok.

2.2.2 Teori Kepemimpinan

Thoha (2010 : 31) menjelaskan beberapa teori yang tidak asing lagi bagi literature-literatur kepemimpinan pada umumnya yaitu :

1. Teori Sifat

Teori Sifat dalam kepemimpinan ini menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin ia akan menjadi pemimpin apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin.

2. Teori Kelompok

Teori Kelompok dalam kepemimpinan ini beranggapan agar kelompok dapat mencapai tujuan-tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikut-pengikutnya.

3. Teori Situasional

Teori Situasional dalam kepemimpinan ini mempunyai pengaruh terhadap peranan kepemimpinan, kecakapan, dan perilakunya, berikut pelaksanaan kerja dan kepuasan para pengikutnya.

4. Model Kepemimpinan Kontijensi dari Fiedler

Teori Kepemimpinan dalam kepemimpinan ini tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan.

5. Teori Jalan Kecil

Teori Jalan Kecil dalam kepemimpinan ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya.

2.2.3 Ciri-Ciri Pemimpin

Untuk memahami lebih dalam tentang ciri-ciri pemimpin ada baiknya kita melihat pendapat Terry (1992 : 156) mengemukakan delapan ciri-ciri dari pemimpin, yaitu sebagai berikut :

1. Energi : mempunyai kekuatan mental dan fisik.
2. Stabilitas emosi : seorang pemimpin tidak boleh berprasangka jelek terhadap bawahannya, ia tidak boleh cepat marah dan percaya pada diri sendiri harus cukup besar.
3. *Human relationship* : mempunyai pengetahuan tentang hubungan manusia.
4. *Personal motivation* : keinginan untuk menjadi pemimpin harus besar, dan dapat memotivasi diri sendiri.
5. *Communication skill* : mempunyai kecakapan untuk berkomunikasi.
6. *Teaching skill* : mempunyai kecakapan untuk mengajarkan, menjelaskan dan mengembangkan bawahannya.
7. *Social skill* : mempunyai keahlian di bidang sosial, supaya terjamin kepercayaan dan kesetiaan bawahannya. Ia harus suka menolong, senang jika bawahannya maju, peramah serta luwes dalam pergaulan.

2.3 Konsep Gaya Kepemimpinan Partisipatif

2.3.1 Pengertian Gaya Kepemimpinan Partisipatif

Menurut Yuki (1998 : 02) bahwa Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikut sertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan partisipatif ini lebih menekankan pada tingginya dukungan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tetapi sedikit pengarahan. Gaya pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan dirujuk sebagai “partisipatif” karena posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Dengan penggunaan gaya partisipatif ini, pemimpin dan bawahan saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.

Sedangkan menurut Sukarna (1990 : 11) Gaya kepemimpinan partisipatif adalah dimana pimpinan selalu memberi kesempatan kepada yang dipimpinnya untuk ikut serta secara aktif, baik mental, spiritual, fisik, maupun material didalam segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Gaya kepemimpinan partisipatif tidak pernah menghambat atau membendung inisiatif-inisiatif bawahan.

Dalam aktivitas menjalankan organisasi, pemimpin yang menerapkan gaya ini cenderung berorientasi kepada bawahan dengan mencoba untuk lebih memotivasi bawahan dibandingkan mengawasi mereka dengan ketat. Mereka mendorong para anggota untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuata keputusan,

menciptakan suasana persahabatan serta hubungan-hubungan saling mempercayai dan menghormati dengan para anggota kelompok.

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seorang pemimpin pada saat porang tersebut mencoba memengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Jadi, menurut Sharma (dalam Anoraga, 2000 : 191) gaya kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan dimana pemimpin memperhatikan pandangan bawahan, memberikan bimbingan pada masalah-masalah yang timbul, dan melibatkan perasaan sendiri dalam membantu bawahan mencapai tujuan organisasi sebaik tujuan individu.

Persepsi bawahan terhadap gaya kepemimpinan partisipatif adalah cara seorang bawahan memberikan arti atau menilai cara pimpinan bekerja bersama bawahan dengan konsultasi dan dengan mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan.

Gaya kepemimpinan partisipatif berkaitan dengan penggunaan berbagai macam prosedur keputusan yang memberikan orang lain pengaruh tertentu terhadap keputusan pemimpin tersebut. Dalam kepemimpinan partisipatif, pemimpin berusaha untuk mendorong dan memfasilitasi orang lain agar berpartisipasi dalam membuat suatu keputusan. Kepemimpinan partisipatif melibatkan aspek-aspek yang sering disebut sebagai pengambilan keputusan bersama, konsultasi, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen demokratis.

Agar proses inovasi di kelurahan dapat berjalan dengan baik, Lurah perlu dan harus bertindak sebagai pemimpin (*leader*) dan bukan bertindak sebagai bos.

Ada perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, seharusnya kepemimpinan Lurah harus menghindari terciptanya pola hubungan dengan bawahan yang hanya mengandalkan kekuasaan, dan sebaliknya perlu mengedepankan kerja sama fungsional. Lurah juga harus menghindarkan diri dari *one man show*, sebaliknya harus menekankan pada kerja sama antar teman sepekerjaan, menghindari terciptanya suasana kerja yang serba menakutkan, dan sebaliknya perlu menciptakan keadaan yang membuat semua bawahan percaya diri.

Sedangkan Gaya Kepemimpinan Demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Pemimpin yang demokratis biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi. Pemimpin menempatkan dirinya sebagai pengontrol, pengatur dan pengawas dari organisasi tersebut dengan tidak menghalangi hak-hak bawahannya untuk berpendapat. Dia juga berfungsi sebagai penghubung antar departemen dalam suatu organisasi. Organisasi yang dibuat dengan teori demokratis ini pun memiliki suatu kelebihan, dimana setiap tugas dan wewenang dari pengurus organisasi tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga jelas bagian-bagian tugas dari masing-masing pengurus, yang mana nantinya tidak akan terjadi campur tangan antar bagian dalam organisasi tersebut. Pembagian tugas ini juga sangat efisien dan efektif bila diterapkan dalam suatu organisasi dimana tujuan utama dari organisasi adalah tercapainya tujuan dan kepentingan bersama.

2.3.2 Ciri-Ciri Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Menurut Bambang (2007 : 24) bahwa cirri-ciri kepemimpinan partisipatif yaitu, sebagai berikut:

1. Setiap keputusan diambil melalui diskusi bersama pihak-pihak yang terkait.
2. Dalam menyelesaikan tugas-tugas, karyawan diberi wewenang, hak, dan tanggung jawab secukupnya untuk menerapkan caranya sendiri yang dianggap efisien.
3. Menilai bawahan secara rasional, dengan melihat data dan fakta.
4. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengajukan pendapat sejauh hal itu sejalan dengan tujuan organisasi.
5. Tidak kaku dalam mengawasi pekerjaan bawahan.

2.3.3 Prosedur Pengambilan Keputusan

Gaya kepemimpinan partisipatif dapat menggunakan berbagai macam bentuk prosedur untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Yukl (2007 : 100) ada empat macam prosedur dalam pengambilan keputusan, yaitu :

1. Keputusan Otokratis
Pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan saran atau pendapat orang lain, dan orang-orang yang terlibat dengan organisasi

tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan tersebut.

2. Konsultasi

Pemimpin akan minta saran atau pendapat orang lain dan mempertimbangkannya sebelum membuat suatu keputusan. Jadi keputusan dibuat dengan mempertimbangkan pendapat orang lain.

3. Keputusan bersama

Pemimpin duduk bersama orang lain, mendiskusikan suatu masalah, kemudian mengambil keputusan bersama.

4. Pendelegasian

Pemimpin memberikan authority/wewenang dan tanggung jawab kepada seseorang atau kelompok.

Dari empat macam prosedur pengambilan keputusan tersebut dapat dibuat suatu *continuum* pengambilan keputusan, yaitu dari yang tidak ada pengaruh orang lain sampai ada pengaruh dari orang lain yang begitu besar.

Penulis menggunakan teori tersebut karena, seperti yang kita ketahui Lurah ingin membangun kemampuan masyarakatnya. Tetapi ketika Lurah akan membuat keputusan, apakah Lurah akan melibatkan masyarakatnya ataukah membuat keputusan sendiri dengan alasan untuk menghemat waktu? “Seorang pemimpin yang partisipatif berarti melibatkan tim dalam membuat beberapa keputusan kunci, bukan seluruh keputusan.

2.4 Konsep Lurah

2.4.1 Pengertian Lurah

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di tingkat desa dan Kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan bisa sesuai dengan yang direncanakan. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Seorang Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai Negeri Sipil.

Satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Ciri utama kelurahan Lurah sebagai Pegawai Negeri dan tidak dipilih oleh rakyat.

2.4.2 Tugas Kelurahan

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota, Tugas Lurah sebagai pemerintah kelurahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Melakukan tugas di bidang pemerintahan , pembangnan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadya gotong royong masyarakat .
4. Melakukan fungsi – fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

Sedangkan dalam tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Pelayanan Masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

2.4.3 Fugsi Lurah

Adapun Fungsi lurah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya.

2. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrarian.
3. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan
4. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayahnya.
5. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan, perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.
6. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kelurahan.
7. Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial.
8. Penyelenggaraan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.

2.4.4 Alokasi Anggaran Kelurahan

Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 juga dikemukakan bahwa keuangan kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya. Alokasi anggaran Kelurahan memperhatikan variable-variable :

1. Besaran kewenangan yang dilimpahkan
2. Jumlah penduduk
3. Kepadatan penduduk
4. Luas wilayah
5. Kondisi geografis / karakteristik wilayah

6. Jenis volume pelayanan dan
7. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan

Dalam konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan pembinaan Camat kepada Lurah sudah merupakan kewajiban yang melekat pada dirinya, mengingat Lurah adalah bawahan Camat.

Aparatur pemerintahan yang terdepan sebagai ujung tombak pemerintahan negara adalah di desa/kelurahan. Pemimpin pada tingkat desa disebut Kepala Desa, dan pemimpin pada tingkat kelurahan disebut Lurah. Kepala Desa dan Lurah memimpin proses kegiatan pemerintahan di wilayahnya.

Pimpinan pemerintahan tingkat kelurahan adalah Kepala Kelurahan atau Lurah. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan absolut, Urusan Pemerintah konkuren, dan Urusan Pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Urusan Pemerintah konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah dan Urusan Pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Kelurahan sebagai unit Pemerintahan terendah dibawah Camat. Pemerintahan Kelurahan adalah organisasi pemerintah yang juga tunduk terhadap

kaidah-kaidah organisasi pada umumnya. Yang dimaksud dengan organisasi Pemerintahan Kelurahan adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala-kepala seksi pada Sekretariat Kelurahan, saling bekerja sama melalui suatu sistem untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pasal 7 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerja.

2.5 Konsep Pembangunan

2.5.1 Pengertian Pembangunan

Jika mendengar kata pembangunan maka yang terlintas dalam pikiran adalah suatu perubahan akan terjadi, yaitu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang ada berubah menjadi atau berganti dengan yang baru. Menurut Alexander (1994:18), pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Protes (1976:19) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Kartasmita (1994:19) memberikan pengertian yang lebih sederhana, pembangunan adalah proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Menurut Riyadi dan Bratakusumah

(2005:19), pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar dan terencana.

2.5.2 Ide Pokok Pembangunan

Adapun menurut Siagian (2005:4), apabila disimak secara cermat dari definisi tersebut, muncul tujuh ide pokok dari pembangunan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. **Pembangunan Merupakan Sebuah Proses**

Pembangunan harus merupakan sebuah proses. Artinya, pembangunan harus tetap berjalan sesuai tahapannya yang berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh dari pelaksanaan pembangunan tertentu.

2. **Pembangunan Dilaksanakan Secara Sadar**

Pembangunan harus dilaksanakan secara sadar. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat tanpa melalui proses atau tahapan tertentu dan dilakukan secara sporadik, insidental tidak dapat dikatakan sebagai pembangunan, sekalipun mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat setempat.

3. **Pembangunan Dilaksanakan Secara Terencana**

Pembangunan harus dilaksanakan secara terencana. Perencanaan dalam pembangunan dapat berupa perencanaan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Setiap tahap memiliki rentang waktu tertentu.

4. Pembangunan Mengarah pada Modernitas

Modernitas merupakan cara hidup yang lebih baru dan lebih baik dari sebelumnya. Demikian pula, pola pikir lebih rasional, tetapi tetap memiliki nilai budaya yang lebih kuat dan mempertahankan tingkat fleksibilitasnya.

5. Pembangunan Wadah Pembinaan Bangsa

Wadah pembinaan bangsa berfungsi untuk memperkuat fondasinya dan memantapkan keberadaannya di dunia internasional. Wadah pembangunan diharapkan dapat menghasilkan kesetaraan terhadap bangsa dan Negara lain di dunia.

2.5.3 Tujuan Pembangunan

Adapun tujuan pembangunan yang dilaksanakan adalah mencapai masyarakat yang sejahtera dengan hakikat untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Jadi, tujuan pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan.
2. Tujuan pembangunan tidak mengenal batas waktu pencapaiannya. Artinya, masih tetap berlaku sepanjang bangsa dan Negara tetap ada di muka bumi ini sejalan dengan berkembangnya konsep kesejahteraan bagi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Arikunto dalam Mulyana (2010:03), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta tampak atau sebagaimana mestinya.

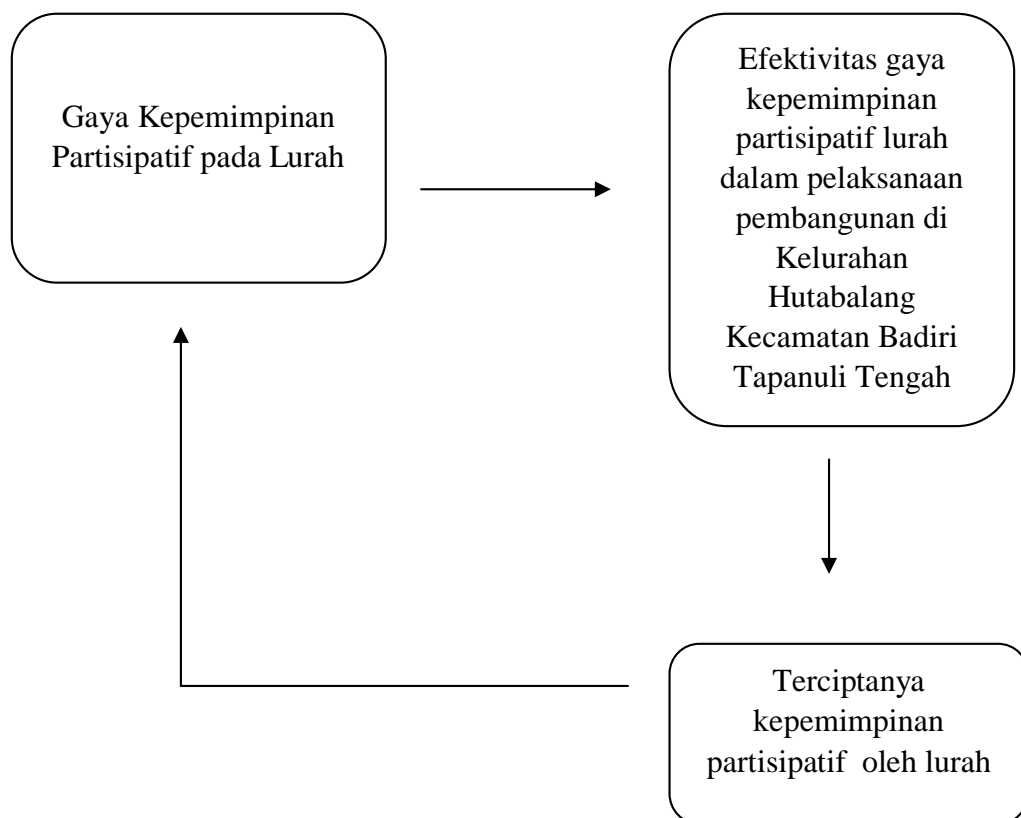
Menurut Moleong (2012:05), penelitian kualitatif memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Pendekatan ini diarahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai realita sosial yang kompleks dalam melihat gaya kepemimpinan partisipatif lurah tersebut.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Gaya Kepemimpinan Partisipatif Lurah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Penelitian



3.3 Defenisi Konsep

Konsep adalah satuan arti yang memiliki sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu (Bahri:2008).

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti.

1. Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan.
2. Gaya Kepemimpinan Partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikut sertakan bawahan dalam pengambilan keputusan.
3. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
4. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah upaya membuat identifikasi atau memilah-milah unit secara jelas (Mustaqim:2017).

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan pelaksanaan pembangunan.
2. Adanya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Adanya penyelenggaraan pembangunan.
4. Adanya perubahan yang direncanakan dalam pelaksanaan pembangunan.

3.5 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dan berkompeten atau menguasai informasi yang diberikan, yakni tentang Efektivitas Gaya Kepemimpinan Partisipatif Lurah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Tapanuli Tengah.

Untuk menentukan narasumber yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini dipilih sejumlah narasumber dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yaitu :

1. Lurah di Kelurahan Hutabalang
 - a. Nama : Mirkhan
 - b. Umur : 52 Tahun
 - c. Jabatan : Lurah
 - d. Alamat : Perumahan Sipange
 - e. Golongan : III C
2. Sekretaris Kelurahan Hutabalang
 - a. Nama : Junaidi Pasaribu
 - b. Umur : 40 Tahun
 - c. Jabatan : Sekretaris Kelurahan
 - d. Alamat : Hutabalang
 - e. Golongan : III A
3. Ketua LPM di Kelurahan Hutabalang
 - a. Nama : Binsar Sitompul
 - b. Umur : 55 Tahun
 - c. Jabatan : Ketua LPM
 - d. Alamat : Hutabalang
4. Perangkat Kelurahan Hutabalang
 - a. Nama : Tiolinar Sihotang
 - b. Umur : 41 Tahun
 - c. Jabatan : Perangkat Kelurahan
 - d. Alamat : Hutabalang
5. Tokoh Agama di Kelurahan Hutabalang

- a. Nama : Kamaluddin Lubis
 - b. Umur : 57 Tahun
 - c. Jabatan : Tokoh Agama
 - d. Alamat : Hutabalang
6. Tokoh Pemuda di Kelurahan Hutabalang
- a. Nama : Asbar Hutagalung
 - b. Umur : 40 Tahun
 - c. Jabatan : Tokoh Pemuda
 - d. Alamat : Hutabalang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang penting dalam suatu penelitian agar diproses hasil yang sesuai dengan kegunaan (harapan) melakukan kesalahan dalam mengumpulkan data yang diperoleh atau yang didapat dari responden. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data atau informasi dan fakta-fakta yang diperlukan dalam penelitian, digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berdasarkan pada pemilihan langsung terhadap objek yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber penelitian dalam hal ini data primer adalah hasil wawancara dari para *key informan* yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, kesimpulan dari definisi data primer didapat dari narasumber yang kita jadikan objek penelitian. Untuk

memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara yaitu mendapatkan data dengan tanya jawab dan berhadapan langsung dengan *informan/narasumber* dan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis, buku atau referensi serta jurnal lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan digunakan sebagai pendukung analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moloeng (2012:248) menjelaskan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Efektivitas Gaya Kepemimpinan Partisipatif Lurah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Tapanuli Tengah.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisa kualitatif.

Analisa data keseluruhan dilakukan dengan peringkasan data yaitu menyeleksi lalu disederhanakan dan diambil makna utamanya (intinya) kemudian disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Tapanuli Tengah, dan waktu penelitian dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Kelurahan Hutabalang

Kelurahan Hutabalang, sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No.73 Tahun 2005 merupakan salah satu pemekaran Desa menjadi Kelurahan yang berada di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Kelurahan Hutabalang terletak di Jalan Simerah Padi. Hutabalang adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

3.9.2 Kondisi Geografis

Kelurahan Hutabalang adalah salah satu Kelurahan yang terdiri dari 10 lingkungan yang memiliki luas wilayah $\pm 8.32 \text{ Km}^2$. Adapun lingkungan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Lingkungan 1
2. Lingkungan II
3. Lingkungan III
4. Lingkungan IV
5. Lingkungan V
6. Lingkungan VI
7. Lingkungan VII
8. Lingkungan VIII
9. Lingkungan IX
10. Lingkungan X

Kelurahan Hutabalang termasuk dalam wilayah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Berjarak $\pm 3 \text{ Km}$ dari Kantor Camat Badiri, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Gunung Kelambu
2. Sebelah Selatan : Desa Jago-Jago
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pinang Sori
4. Sebelah Barat : Kelurahan Lopian

Kelurahan Hutabalang berada pada ketinggian antara \pm 5 m diatas permukaan laut terletak dijalur antara Kecamatan Pinang Sori dan Kelurahan Lopian.

3.9.3 Kondisi Demografi

Tabel 3.1

Data Penduduk Kelurahan Hutabalang Tahun 2018

NO	NAMA		JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	KEPALA LINGKUNGAN	LK	TAHUN 2018		KEPALA
			L	P	KELUARAGA
1	RULMAN SIHOTANG	I	675	651	367
2	JOHRUDDIN SITOMPUL	II	473	454	286
3	AMRUN MARBUN	III	288	294	180
4	SALOMO TINAMBUNAN	IV	422	422	246
5	DAMSIR SITOMPUL	V	329	348	205
6	JANUARI MENDROFA	VI	359	381	188
7	TIMAN	VII	611	596	333
8	ALBIDEN R.D. RAJA	VIII	471	445	245
9	TUKINO	IX	515	468	300
10	EDY S. HUTAURUK	X	192	151	93
JUMLAH			4.335	4.210	2.443

Sumber : Data Kantor Kelurahan Hutabalang Tahun 2018

3.9.4 Sarana dan Prasarana Kelurahan Hutabalang

Kelurahan Hutabalang terhubung dengan desa/kelurahan lain melalui jalan raya/jalan provinsi. Jalan beraspal juga sudah ada di Kelurahan Hutabalang.

Tabel 3.2

Sarana dan Prasarana Kelurahan Hutabalang

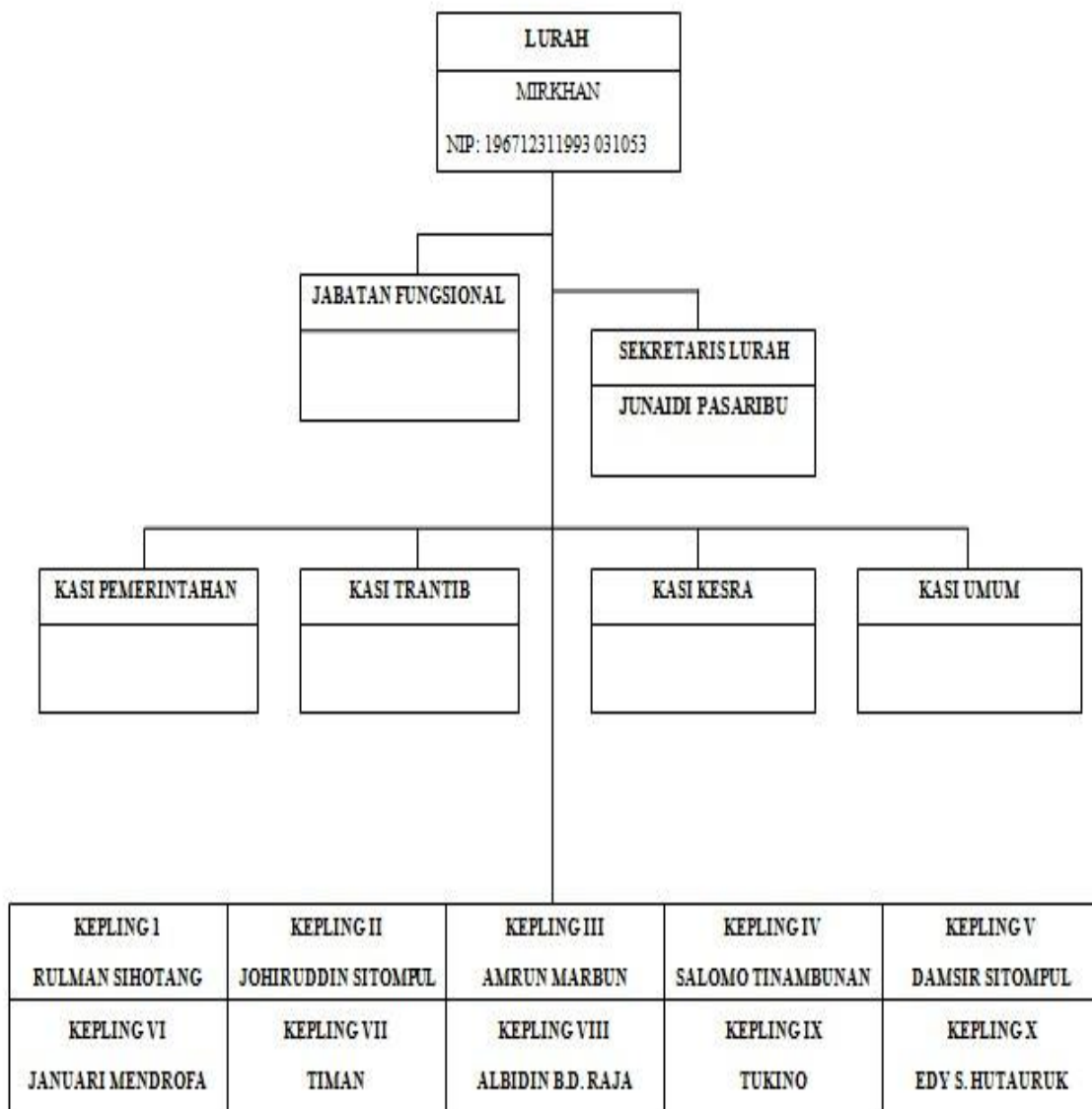
No	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Masjid	5 unit
2	Musholla	1 unit
3	Gereja	7 unit
4	Paud	2 unit
5	TK	2 unit
6	SD	6 unit
7	SMP	2 unit
8	Madrasah	1 unit
9	Puskesmas Hutabalang	1 unit
10	Posyandu	6 unit
11	Kantor Kelurahan	1 unit
12	TPU	2 unit
13	KUD	1 unit
14	BANK	2 unit

Sumber : Data Kantor Kelurahan Hutabalang Tahun 2018

3.9.5 Struktur Organisasi

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Kelurahan Hutabalang



Sumber : Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

2018

3.9.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Kurahan Hutabalang

Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggung jawabannya. Dengan adanya struktur pemerintahan ini sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat desa yang akan saling berkoordinasi.

1. Lurah

Lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kedudukan Lurah berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Lurah mempunyai Tugas Pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Lurah mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan kantor kelurahan
- b. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas pada kantor kelurahan
- c. Menetapkan program kerja kelurahan sesuai dengan rencana strategis pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

- d. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan
- e. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- f. Melakukan pemberdayaan masyarakat
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat
- h. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- i. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- j. Melaksanakan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan social
- k. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan
- l. Merumuskan kebijakandan solusi pemecah terhadap masalah-masalah pelaksanaan tugas kantor kelurahan
- m. Memberikan sarana dan pertimbangan kepada Camat sehubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan kelurahan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinyaMelaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan adalah unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam memberikan

pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kelurahan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Sekretaris Kelurahan
- b. Merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan sekretaris kelurahan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja kelurahan
- d. Menghimpun dan menganalisa data administrasi dalam berbagai bentuk dan keperluannya
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretaris kelurahan dengan seksi-seksi lainnya
- f. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan di lingkungan kantor Lurah
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan
- h. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran kantor lurah
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap urusan kepegawaian
- j. Melaksanakan urusan examisasi terhadap surat-menyurat yang dikeluarkan kantor kelurahan

- k. Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas staf sekretaris
- l. Meneruskan proses surat-menyurat kepada Lurah
- m. Menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Lurah
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

3. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan adalah unsure teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas di bidang Pemerintahan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan
- b. Merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan seksi pemeritahan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan
- c. Menghimpun dan menganalisa data administrasi dalam berbagai bentuk dan keperluannya

- d. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pelaksanaan pemerintahan kelurahan
- e. Mengelola administrasi kependudukan serta melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi kependudukan kelurahan
- f. Memonitoring dan mengarahkan pelaksanaan tugas pemerintahan kelurahan
- g. Melaksanakan pembinaan organisasi social politik termasuk pelaksanaan pemilihan umum dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- h. Menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas staf untuk bahan peningkatan kinerja
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan dengan seksi-seksi lain dan dengan Sekretaris Kelurahan
- j. Menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Lurah
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Lurah dalam melaksanakan tugas di bidang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, menyelenggarakan fungsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- b. merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan
- c. menghimpun dan menganalisa data administrasi dalam berbagai bentuk dan keperluanya
- d. melaksanakan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat
- e. melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap ketentraman dan ketertiban umum
- f. melaksanakan monitoring dan pengendalian terhadap izin-izin usaha di wilayah kerja Kelurahan
- g. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas staf untuk bahan peningkatan kinerja
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban dengan seksi-seksi lain dan Sekretaris Kelurahan
- i. meneruskan proses surat-menyurat kepada Lurah

- j. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Lurah
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

5. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan

Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan adalah unsur teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas di bidang Pembangunan dan Kesejahteraan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan
- b. merumuskan langkah-langkah kerja/kegiatan seksi pembangunan dan kesejahteraan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan
- c. menghimpun dan menganalisa data administrasi dalam berbagai bentuk dan keperluanya

- d. melaksanakan pembinaan terhadap pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat Kelurahan
- e. memberikan petunjuk tentang penyusunan rencana pembangunan Kelurahan
- f. menyiapkan bahan-bahan penyaluran bantuan pembangunan dari pemerintah untuk pembangunan masyarakat kelurahan
- g. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kelembagaan masyarakat kelurahan
- h. menganalisa hasil-hasil pelaksanaan tugas staf untuk bahan peningkatan kinerja
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan kesejahteraan dengan seksi-seksi lain dan Sekretaris Kelurahan
- j. meneruskan proses surat-menyurat kepada Lurah
- k. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada Lurah
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, maka diperoleh berbagai data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan dibahas data yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupten Tapanuli Tengah. Pada kesempatan ini penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti dan menganalisa data-data yang telah diperoleh. Sebelum menganalisa data tersebut terlebih dahulu mengklasifikasikan data tersebut menurut alternatif jawaban yang diperoleh.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka digunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Identitas Narasumber

Berdasarkan jenis kelamin narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan Pada tabel 4.1 berikut dijelaskan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.1**Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-Laki	5 Orang
2	Perempuan	1 Orang
Jumlah		6 Orang

Sumber : Data Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan sebanyak 6 orang.

2. Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan narasumber dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi didalam dunia pendidikan yaitu tingkat SMA dan Tingkat Sarjana Pada tabel 4.2 ini berikut disajikan untuk masing-masing dari kategori tersebut.

Tabel 4.2**Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1	SMA	4 Orang
2	Sarjana	2 Orang
Jumlah		6 Orang

Sumber : Data Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki tingkat pendidikan sampai SMA sebanyak 4 orang. Sementara itu tingkat Sarjana sebanyak 1 orang.

3. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu Lurah, Sekretaris Kelurahan, Perangkat Kelurahan, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat Pada tabel 4.3 ini kita akan melihat frekuensi untuk masing-masing kategori tersebut menurut pekerjaan dan jabatan yang dimiliki peserta wawancara.

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdsarkan Jabatan Pekerjaan

No	Jabatan Pekerjaan	Frekuensi
1	Lurah	1 Orang
2	Sekretaris Kelurahan	1 Orang
3	Ketua LPM	1 Orang
4	Perangkat Kelurahan	1 Orang
5	Tokoh Masyarakat	2 Orang
Jumlah		6 Orang

Sumber : Data Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam wawancara kepada narasumber yang memiliki pekerjaan jabatan sebagai Lurah sebanyak 1 orang, Sekretaris Kelurahan 1 orang, Ketua LPM 1 orang, Perangkat Kelurahan 1 orang dan Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang.

4. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan dari umur narasumber dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi didalam dunia pendidikan yaitu 40-50 dan 50-60 Pada tabel 4.4 ini berikut disajikan untuk masing-masing dari kategori tersebut.

Tabel 4.4

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi
1	40 – 50 Tahun	3 Orang
2	50 – 60 Tahun	3 Orang
Jumlah		6 Orang

Sumber : Data Tahun 2018

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada narasumber untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan - pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan narasumber penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara terhadap narasumber, penulis mengamati keadaan dan situasi yang ada pada Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :

1. Adanya tujuan pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini Pelaksanaan Pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Sebagai suatu program Pemerintah yang bertujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah kemajuan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mirkhan selaku Lurah di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“tujuan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan adalah sesuai dengan tugas pokok Lurah dalam penyeleggaraan*

pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan, yang meliputi untuk menetapkan program kerja Kelurahan, menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan, pembinaan perekonomian, produksi, distribusi, pembinaan sosial, merumuskan kebijakan dan solusi pemecahan masalah”.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 11.09 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Junaidi Pasaribu selaku Sekretaris Kelurahan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengatakan bahwa *“tujuan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu jika dilihat dari pertanian meningkatkan daripada penghasilan petani, karena jika masyarakat bisa bekerjasama antara Lurah dengan kepling saling mendukung dari adanya program Pemerintahan Daerah tersebut”.*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 11.28 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Binsar Sitompul selaku Ketua LPM di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“tujuan pelaksanaan pembangunan yaitu untuk meningkatkan kesetaraan dan taraf hidup masyarakat dalam hal ini Lurah itu berusaha untuk mengusulkan ke atas ketika tahap tertinggi yang merupakan tujuan mencetak kemasyarakatan”.*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 12.41 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tiolinar Sihotang selaku Perangkat Kelurahan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“tujuan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu tujuan yang telah dilakukan Lurah sesuai dengan Pemerintahan Kelurahan yang merupakan pemegang kendali dalam Pembangunan di wilayah Kelurahan. Oleh karena itu, lurah sebagai Pembina untuk memberi pendorong proses pembangunan ke arah yang lebih baik serta melakukan pembinaan perekonomian, produksi, distribusi dan pembinaan sosial”*.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 11.24 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kamaluddin Lubis selaku Tokoh Agama di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“tujuan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu beliau mengatakan dengan adanya tujuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan cukup membantu dalam segala hal termaksud dalam pekerjaan pemerintah kelurahan dan sebagai Pembina cukup membantu proses berjalannya pembangunan, melakukan pembinaan perekonomian,*

produksi, distribusi dan pembinaan sosial serta mengajari bagaimana cara mengelola tata kelola kelurahan dengan baik”.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 12.26 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Asbar Hutagalung selaku Tokoh Pemuda di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“tujuan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu memberikan dorongan atau pembinaan kepada masyarakat khususnya kepada para pegawai dan pemuda dalam bidang usaha”.*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 12.26 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Adanya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan

Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif untuk pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil dari proses yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan. Keputusan dibuat berguna untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mirkhan selaku Lurah di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“sebelum pengambilan keputusan Lurah*

selalu memberikan kesempatan pada pegawai untuk memberikan saran atau ide-ide beliau berpendapat iya tentu, karena untuk mengambil satu persepsi itu harus dilakukan dengan cara musyawarah dengan pegawai dalam hal mengambil keputusan”.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 11.09 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Junaidi Pasaribu selaku Sekretaris Kelurahan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengatakan bahwa *“sebelum pengambilan keputusan Lurah selalu memberikan kesempatan pada pegawai untuk memberikan saran atau ide-ide beliau berpendapat tentu saja iya, karena dengan adanya Lurah memberikan kesempatan untuk para pegawainya akan bisa membuat suatu keputusan yang sangat bagus dan akan mendapatkan hasil yang baik”.*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 11.28 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Binsar Sitompul selaku Ketua LPM di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“sebelum pengambilan keputusan Lurah selalu memberikan kesempatan pada pegawai untuk memberikan saran atau ide-ide beliau mengatakan iya, Lurah selalu memberikan para pegawainya untuk mengusulkan pendapat masing-masing di dalam*

pengambilan keputusan dan salah satu contohnya yaitu yang telah dilakukan dalam musrembang. Setiap pengusulan pembangunan diwilayah Kelurahan itu diadakan dengan cara musrembang dan itu pun akan selalu melibatkan semua elemen-elemen masyarakat misalkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan termasuk kepling yang ada di Kelurahan ini pun ikut hadir yang tidak ikut cuman hanya perangkat-perangkat Kelurahan”.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 12.41 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tiolinar Sihotang selaku Perangkat Kelurahan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“sebelum pengambilan keputusan Lurah memberikan kesempatan pada pegawai untuk memberikan saran atau ide-ide beliau mengatakan dalam memberikan kesempatan kepada pegawai iya jelas ada, karena pegawai disini berhak untuk memberikan kesempatan untuk mengusulkan pendapat dan melakukan musyawarah bersama dalam pengambilan keputusan tersebut”.*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 11.24 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kamaluddin Lubis selaku Tokoh Agama di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“sebelum pengambilan*

keputusan Lurah memberikan kesempatan pada pegawai untuk memberikan saran atau ide-ide beliau mengatakan Iya, untuk setiap pengambilan keputusan Lurah selalu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan saran atau ide-ide yang nantinya akan dipertimbangkan terlebih dahulu”.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 12.26 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Asbar Hutagalung selaku Tokoh Pemuda di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa :*“sebelum pengambilan keputusan Lurah memberikan kesempatan pada pegawai untuk memberikan saran atau ide-ide beliau mengatakan iya, Lurah selalu memberikan hak kepada pegawainya untuk mengusulkan suatu pendapat mereka masing-masing dalam mengambil suatu keputusan”.*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 12.26 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

3. Adanya penyelenggaraan pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan adalah perencanaan, apabila perencanaannya sudah tersusun secara terperinci dan jelas maka penyelenggaraan pembangunan bisa sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Mirkhan selaku Lurah di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

mengatakan bahwa *“kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu belum ada dana yang khusus untuk pembangunan Kelurahan seperti Dana Desa dan masih minimnya anggaran APBD untuk Kelurahan”*.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 11.09 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Junaidi Pasaribu selaku Sekretaris Kelurahan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengatakan bahwa *“kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu masih kurangnya dana yang datang dari APBD maupun APBN”*.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 11.28 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Binsar Sitompul selaku Ketua LPM di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu kurangnya dana untuk Kelurahan baik yang datang dari APBD maupun dari APBN”*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 12.41 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tiolinar Sihotang selaku Perangkat Kelurahan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“kendala yang dihadapi dalam*

penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri yaitu masih minimnya dana yang ada di Kelurahan baik itu dari APBD ataupun APBN”.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 11.24 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kamaluddin Lubis selaku Tokoh Agama di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri yaitu belum adanya dana yang khusus untuk pembangunan Kelurahan serta masih minimnya anggaran APBD untuk Kelurahan”.*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 12.26 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Asbar Hutagalung selaku Tokoh Pemuda di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“kendala yang dihadapi yaitu anggaran dana di Kelurahan masih kurang baik itu datangnya dari APBD ataupun APBN”.*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 12.26 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

4. Adanya perubahan yang direncanakan dalam pelaksanaan pembangunan

Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mirkhan selaku Lurah di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“perubahan yang telah direncanakan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri beliau mengatakan hasil yang diperoleh adalah meningkatnya pendapatan masyarakat petani baik peningkatan produksi maupun peningkatan kualitas, timbulnya kesadaran masyarakat akan lingkungan yang sehat serta meningkatnya masyarakat, balita, ibu hamil dan Lansia untuk pemeriksaan kesehatan di posyandu”*.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 11.09 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Junaidi Pasaribu selaku Sekretaris Kelurahan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengatakan bahwa *“perubahan yang telah direncanakan yaitu hasilnya tergantung pembangunannya berada dibidang mana,*

kalo seandainya dibidang pertanian pasti banyak positifnya, karena ada yang irigasi serta ada yang jalannya menuju persawahan. Jadi, jika itu sudah dibangun maka masyarakatnya sudah sangat terbantu dan contohnya peningkatan produksi”.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 11.28 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Binsar Sitompul selaku Ketua LPM di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“perubahan yang telah direncanakan yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat petani, timbulnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan meningkatnya untuk pemeriksaan kesehatan di posyandu”*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 12.41 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tiolinar Sihotang selaku Perangkat Kelurahan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“perubahan yang telah direncanakan yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat, produksi, kualitas dan masih kurang kesadaran masyarakat tentang adanya hidup bersih dan sehat”*

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 11.24 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kamaluddin Lubis selaku Tokoh Agama di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“perubahan yang telah direncanakan yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat petani baik peningkatan produksi maupun peningkatan kualitas serta meningkatnya masyarakat , balita, ibu hamil dan lansia untuk pemeriksaan kesehatan di posyandu”*.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 12.26 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Asbar Hutagalung selaku Tokoh Pemuda di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa *“perubahan yang telah direncanakan yaitu sangat meningkatnya produksi maupun kualitas dan adanya masih kurang kesadaran terhadap hidup bersih dan sehat”*.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2019, pukul 12.26 WIB di Kantor Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada narasumber penelitian dan juga melakukan pengamatan-pengamatan terhadap fenomena yang ada terkait dengan masalah serta keadaan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang efektivitas gaya kepemimpinan partisipatif Lurah dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis paparkan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

1. Tujuan Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Nainggolan (2006 : 8) efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Pada hakikatnya hampir seluruh organisasi mempunyai impian (*dream*) dan gambaran tentang masa depan dirinya, terlebih bagi organisasi yang berfokus pada *prof oriented* mereka selalu mempunyai target tertentu. Untuk mewujudkan impian tersebut, suatu organisasi harus dapat memaparkannya secara tertulis

sebagai pedoman dalam mewujudkannya, yang lebih dikenal dengan perancangan sistem manajemen kinerja. Adapun bentuk-bentuk dari pedoman tersebut seperti pembuatan tujuan dalam pelaksanaan pembangunan yang matang.

Dalam menjalankan misinya, suatu lembaga akan menentukan tujuan yang harus dicapai dalam rangka menetapkan standar yang harus dipenuhi sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah misi. Tujuan merupakan pernyataan kualitatif mengenai keadaan ataupun hasil yang ingin dicapai dimasa akan datang.

Tujuan dalam pelaksanaan pembangunan yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan Pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Tujuan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual.

Pengertian tujuan merupakan misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang dan manajer bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan dari salah satu hasil wawancara berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Pasaribu selaku Sekretaris Kelurahan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengatakan bahwa tujuan dalam pelaksanaan pembangunan yaitu jika dilihat dari pertanian meningkatkan daripada penghasilan petani, karena jika masyarakat bisa

bekerjasama antara Lurah dengan kepling saling mendukung dari adanya program Pemerintahan Daerah tersebut.

Dengan adanya tujuan tersebut dapat membuat pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai . Seperti yang diketahui bahwa efektivitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat yang dilakukan. Jadi, perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan atau dampak akibat sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang itu. Setiap suatu pekerjaan yang efisien tentu ada juga yang efektif, karena dilihat dari segi usaha, hasil yang dilakukan telah tercapai dan bahkan melebihi yang tidak diduga dengan penggunaan unsur minimal.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan Lurah telah berjalan dengan baik namun belum efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tujuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan telah dijalankan dengan baik dan benar dilapangan juga dapat dilihat sesuai dengan tugas pokok Lurah dalam penyeleggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan. Namun tujuan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terdapat beberapa dukungan terhadap gaya kepemimpinan partisipatif Lurah yang telah direncanakan.

2. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan

Sukarna (1990 : 11) Gaya kepemimpinan partisipatif adalah dimana pimpinan selalu memberi kesempatan kepada yang dipimpinnya untuk ikut serta

secara aktif, baik mental, spiritual, fisik, maupun material didalam segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Pengertian Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif untuk pemecahan masalah. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan. Keputusan dibuat berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Dari penjelasan tersebut pengambilan keputusan berfungsi sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah. Setiap pengambilan keputusan memiliki fungsi yang berbeda-beda, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari salah satu hasil wawancara dengan Bapak Binsar Sitompul selaku Ketua LPM di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa Lurah selalu memberikan kesempatan para pegawainya untuk mengusulkan pendapat masing-masing di dalam pengambilan keputusan dan salah satu contohnya yaitu yang telah dilakukan dalam musrembang. Setiap pengusulan pembangunan diwilayah Kelurahan itu diadakan dengan cara musrembang dan itu pun akan selalu melibatkan semua elemen-elemen masyarakat misalkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan termasuk kepling yang ada di Kelurahan ini pun ikut hadir yang tidak ikut cuman hanya perangkat-perangkat Kelurahan.

Kemudian di dalam rapat atau musyawarah yang dilaksanakan di Kelurahan, rapat selalu berjalan dengan lancar meskipun terkadang ada sedikit perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tersebut tidak menjadikan hambatan di dalam proses berlangsungnya rapat, bahkan membawa dampak

positif kepada peserta rapat dan yang lebih utama kepada Lurah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pendapat semakin banyak pula ide-ide yang harus dipecahkan.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang telah berjalan dengan baik, karena di dalam setiap pengambilan keputusan Lurah selalu memberikan kesempatan kepada pegawai atau perangkat-perangkat lain untuk memberikan pendapat mereka masing-masing dan Lurah selalu mendengarkan aspirasi mereka melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk mengusulkan pendapat masih kurang, karena di dalam musyawarah Lurah masih dihiasi dengan gaya kepemimpinan demokratis yaitu dengan menggunakan kemampuan Lurah mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta senang mengembangkan kapasitas dari pribadinya sebagai pemimpin dan selalu menerima saran, pendapat serta kritik dari bawahannya atau aparat desa.

3. Penyelenggaraan pembangunan

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di Tingkat Desa dan Kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan bisa sesuai dengan yang direncanakan.

Pengertian Penyelenggaraan pembangunan adalah perencanaan, apabila perencanaannya sudah tersusun secara terperinci dan jelas maka penyelenggaraan pembangunan bisa sesuai dengan yang direncanakan.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Ibu Tiolar Sihotang selaku Perangkat Kelurahan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri yaitu masih minimnya dana yang ada di Kelurahan baik itu dari APBD ataupun APBN.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pembangunan dilakukan merupakan pencerminan dari sebuah tanggung jawab yang diemban selaku pimpinan di Kelurahan Hutabalang, hal ini tentunya menjadi tolok ukur kapasitas dalam menciptakan lingkungan yang baik. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang terjadi di Kelurahan Hutabalang yaitu adanya kendala terhadap penyelenggaraan pembangunan, maka kendala yang ada di penyelenggaraan pembangunan tersebut belum ada dana yang khusus untuk pembangunan Kelurahan seperti Dana Desa dan masih minimnya anggaran APBD maupun dari APBN untuk Kelurahan sehingga penyelenggaraan pembangunan itu tidak bisa berjalan dengan lancar karena dengan adanya kendala tersebut.

4. Perubahan yang direncanakan dalam pelaksanaan pembangunan

Protes (1976:19) pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pengertian perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bias berupa perubahan pola pikir dan perilaku suatu masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Kamaluddin Lubis selaku Tokoh Agama di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan bahwa perubahan yang telah direncanakan yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat petani baik peningkatan produksi maupun peningkatan kualitas serta meningkatnya masyarakat , balita, ibu hamil dan lansia serta pemeriksaan kesehatan di posyandu.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa perubahan memang benar ada di dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh Lurah untuk mengetahui bagaimana hasil yang didapatkan setelah adanya perubahan. Terbukti bahwa adanya perubahan akan meningkatnya pendapatan masyarakat petani terhadap peningkatan produksi ataupun peningkatan kualitas, bahkan dengan adanya memberikan pemeriksaan kesehatan di posyandu maka akan meningkatkan kualitas kesehatan bagi para ibu hamil dan balita yang ada di Kelurahan Hutabalang tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulispenulis melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Adapun simpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Gaya Kepemimpinan Partisipatif yang digunakan Lurah telah berjalan dengan baik namun belum efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan telah dijalankan dengan baik dan benar dilapangan juga dapat dilihat sesuai dengan tugas pokok Lurah dalam penyeleggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan.
2. Pengambilan Keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang telah berjalan dengan baik, karena di dalam setiap pengambilan keputusan Lurah selalu memberikan kesempatan kepada pegawai atau perangkat-perangkat lain untuk memberikan pendapat mereka masing-masing dan Lurah selalu mendengarkan aspirasi mereka melaluimusyawarah untuk mencapai mufakat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk mengusulkan pendapat

masih kurang, karena di dalam musyawarah Lurah masih dihiasi dengan gaya kepemimpinan demokratis.

3. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang terjadi di Kelurahan Hutabalang yaitu adanya kendala terhadap penyelenggaraan pembangunan, maka kendala yang ada di penyelenggaraan pembangunan tersebut belum ada dana yang khusus untuk pembangunan Kelurahan seperti Dana Desa dan masih minimnya anggaran APBD maupun dari APBN untuk Kelurahan sehingga penyelenggaraan pembangunan itu tidak bisa berjalan dengan lancar karena dengan adanya kendala tersebut.
4. Perubahan dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh Lurah yaitu adanya perubahan akan meningkatnya pendapatan masyarakat petani terhadap peningkatan produksi ataupun peningkatan kualitas, bahkan dengan adanya memberikan pemeriksaan kesehatan di posyandu maka akan meningkatkan kualitas kesehatan bagi para ibu hamil dan balita yang ada di Kelurahan Hutabalang tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Efektivitas Gaya Kepemimpinan Partisipatif Lurah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Lurah Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah untuk lebih meningkatkan gaya kepemimpinan partisipatif agar pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang dapat lebih meningkat sehingga dapat melaksanakan tugas pokok Lurah dengan baik.
2. Diharapkan agar Lurah Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah untuk selalu bekerjasama di dalam setiap musyawarah sehingga dapat mencapai pelaksanaan pembangunan secara efektif terhadap gaya kepemimpinan partisipatif.
3. Diharapkan agar Pemerintah Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meningkatkan dana khusus untuk pembangunan Kelurahan seperti Dana Desa.
4. Diharapkan agar Pemerintah Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah untuk lebih meningkatkan lagi pendapatan masyarakat petani agar kesadaran masyarakat akan tentang adanya hidup bersih dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. dkk. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PPM.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi 1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Tentang Desa & Kelurahan. 2007. Jakarta. PIDL.
- Sunyoto, Danang. dkk. 2015. *Teori Perilaku Keorganisasian*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutikno, Raja Bambang2007. *The Power of Emphaty in Leadership*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Thoha, Miftah. 2014. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thoha, Miftah. 2013. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo. 2016. *Perilaku Dalam Organsisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Maradona Abdullah, Aji Ratna Kusuma, Bambang Irawan : Efektivitas Gaya Kepemimpinan Lurah Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda.
- Badarus Samsi, Boedijono, Dina Suryawati : Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Terhadap Efektivitas Kerja Bawahan Di Kantor Desa Bago Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.
- Multazam Fadli Masruhin, A. Kholiq Azhari, Boedijono : Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan.

Skripsi

Katrina. 2017. *Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja*. Skripsi: UNHAS.

M. Rendra Rinaldi. 2016. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Sripendowo Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Skripsi: Universitas Lampung.

Website

[https://www.academia.edu/8946730/JENIS - JENIS_GAYA_KEPEMIMPINAN](https://www.academia.edu/8946730/JENIS_-_JENIS_GAYA_KEPEMIMPINAN)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Julita Dewi

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juli 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl.H.Adam Malik Gg. Batang Gadis III Sipolu-Polu

Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara

a. Nama Ayah : Fahrudin Batubara

b. Nama Ibu : Anna Delima

c. Alamat : Jl.H.Adam Malik Gg. Batang Gadis III Sipolu-Polu

II. PENDIDIKAN

1. Tahun 2003-2009 : SDN 088 PANYABUNGAN
2. Tahun 2009-2012 : SMP NEGERI 1 PANYABUNGAN
3. Tahun 2012-2015 : SMA NEGERI 1 PANYABUNGAN
4. Terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Admnistrasi Negara (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun Akademik 2015/2016.

Penulis

JULITA DEWI

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Julita Dewi

NPM : 1503100034

Judul : Efektivitas Gaya Kepemimpinan Partisipatif Lurah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

Daftar Pertanyaan :

1. Adanya tujuan dalam pelaksanaan pembangunan
 - a. Apa saja tujuan yang dilakukan Lurah dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan hutabalang kecamatan badiri?
 - b. Apakah gaya kepemimpinan partisipatif Lurah dapat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?
 - c. Apakah gaya kepemimpinan partisipatif Lurah dapat mencapai rencana guna pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?
 - d. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?

Daftar Pertanyaan :

2. Adanya pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan
 - a. Apakah sebelum pengambilan keputusan Kepala Kelurahan memberikan kesempatan pada pegawai untuk memberikan saran atau ide-ide ?
 - b. Apa saja kendala yang di hadapi Kepala Kelurahan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?
 - c. Bagaimanakah proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?
 - d. Bagaimana langkah-langkah sistematis terhadap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?

Daftar Pertanyaan:

3. Adanya penyelenggaraan pembangunan
 - a. Apa yang menjadi landasan/regulasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?
 - c. Bagaimana proses penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?
 - d. Bagaimana persiapan Lurah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?

Daftar Pertanyaan :

4. Adanya perubahan yang direncanakan dalam pelaksanaan pembangunan
 - a. Apa saja perubahan yang direncanakan Kepala Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri ?
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi proses perubahan yang direncanakan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?
 - c. Bagaimana wujud proses perubahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?
 - d. Dalam pelaksanaan pembangunan hasil apa yang didapat dari perubahan yang telah direncanakan di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri?